

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan. Dalam sistem pendidikan, pengelolaan keuangan menjadi aspek strategis yang berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara baik, transparan, dan bertanggung jawab dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana, terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik guna menghasilkan pendidikan yang bermutu. Selain itu, peraturan tersebut menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran, pengawasan serta pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. (Agustina, 2021)

Pengelolaan keuangan sekolah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam kenyataannya. Banyak sekolah mengalami kendala dalam hal pendanaan. Keterbatasan dana sering kali menjadi faktor utama yang menghambat dalam optimalisasi operasional sekolah. Menurut Handayani, (2017) kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain keterlambatan peserta didik dalam pembayaran SPP serta minimnya dukungan pendanaan dari pihak eksternal. Selain itu, alokasi dana yang belum merata serta rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran sering menimbulkan ketidakefisienan penggunaan dana. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada menurunnya kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, setiap sekolah wajib mengelola dana pendidikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara efektif dan berhak mengetahui penggunaan dana yang diterima.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekolah di Indonesia perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang efisien dan fleksibel. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah model pengelolaan partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua peserta didik, komite sekolah, serta masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan sekolah dapat terlaksana secara lebih transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan secara baik memiliki peran penting tidak hanya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah dengan tata kelola keuangan yang efektif mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mendukung pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif bagi peserta didik. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Namun, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara konsep pengelolaan keuangan secara teoritis dengan praktik yang terjadi di sekolah. Tidak semua satuan pendidikan mampu mengelola keuangan dengan optimal. Sekolah swasta, khususnya yang berada di bawah naungan yayasan, seringkali menghadapi tantangan administratif seperti belum adanya regulasi internal yang tertulis, kurangnya kapasitas manajerial, atau ketergantungan pada kebijakan informal dari yayasan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Padahal sebagian sekolah swasta

juga menerima pendanaan dari pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang pengelolaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SD Islam Terpadu Nurul Anshar Panji Situbondo merupakan salah satu sekolah swasta yang memiliki perkembangan cukup pesat di Kabupaten Situbondo. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1999 dan telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Pada tahun ajaran 2024/2025, SD Islam Terpadu Nurul Anshar Panji Situbondo tercatat memiliki jumlah peserta didik terbanyak di wilayahnya, yaitu sebanyak 632 siswa. Sekolah ini memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, yaitu dana BOS dan dana infak dari wali murid. Dalam pengelolaan keuangannya, kepala sekolah menyatakan bahwa yayasan memang memiliki aturan, namun bersifat tidak tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan sekolah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada salah satu sekolah di Kabupaten Situbondo, yaitu SD Islam Terpadu Nurul Anshar. Dengan demikian penelitian mengambil judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Pada SD Islam Terpadu Nurul Anshar Panji Situbondo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan adalah Bagaimana pengelolaan keuangan sekolah di SD Islam Terpadu Nurul Anshar Panji Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan sekolah yang diterapkan di SD Islam Terpadu Nurul Anshar Panji Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian

Hasil dari Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan yang diterapkan di sekolah.

2. Bagi Sekolah SD Islam Terpadu Nurul Anshar Panji Situbondo

Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pemikiran sebagai pertimbangan atau masukan untuk mengelola keuangan sekolah.

3. Penelitian Selanjutnya

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi mengenai topik-topik yang berkaitan yang dapat dijadikan bahan masukan pemikiran sebagai pertimbangan khususnya bagi mereka yang ingin Penelitian lanjutan.